

Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta

Any Sundari

Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta

neysundari2010@gmail.com

Abstract

Women's participation in politics is a crucial discourse in Indonesia. Affirmative action policy by providing 30% quota for women in parliament is a positive thing enforcing women to enter into political contestation. However, encouraging women to engage in politics is not easy task. Politics from the outset has been identified as a distinctive world of men and women experienced constant domestication systematically orchestrated by the state. *Ibuism* ideology caused women to experience a variety of vulnerabilities and bundle of violences in formal politics. To revive women politically especially at the community level, women can learn to negotiate outside of formal politics to voice their representation.

Keywords: female politics, participation, community.

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan diskursus penting di Indonesia. Kebijakan afirmatif kuota 30% kepada perempuan di parlemen merupakan hal positif guna mendorong perempuan berkontestasi. Namun, mendorong perempuan untuk berpolitik bukanlah perkara mudah. Politik sejak awal sudah diidentikkan sebagai dunia yang laki-laki dan negara secara sistematis melakukan domestifikasi perempuan dalam rumah. Ideologi ibuisme ini membawa perempuan mengalami berbagai kerentanan kekerasan dan menumpulkan potensi perempuan untuk berpolitik. Karena hal ini maka dibutuhkan kerja-kerja pengorganisasian untuk membangkitkan semangat perempuan berpolitik, terutama pada level komunitas karena pada level inilah sebenarnya perempuan bisa belajar bernegosiasi dan berpolitik di luar politik formal parlemen.

Kata kunci: politik perempuan, partisipasi, komunitas.

Pendahuluan

Sebuah perkataan sederhana tertulis indah dalam sajak-sajak Wiji Thukul: "Jika kau menghamba pada ketakutan, kita memperpanjang barisan perbudakan". Apa yang diungkapkan Wiji selaras dengan pengalaman yang dirasakan oleh para perempuan. Perempuan memiliki sejarah panjang didera dalam ruang ketakutan, terlanggengkan dalam perbudakan dan penindasan. Hal senada juga diungkapkan oleh Nawal El Sadawi, pembelengguan dan penindasan perempuan merupakan bagian yang tak dipisahkan dari sejarah perbudakan terhadap kemanusiaan. Berpuluh bahkan ratusan tahun, pembelengguan ini dilawan oleh perempuan dengan berbagai cara. Seluruh arena dimasuki untuk menghentikan pembelengguan dan penindasan. Mereka turun ke jalan, menggelar aksi hingga berkontestasi dalam arena politik formal melalui partai politik. Perjuangan perempuan dalam kancah politik formal seperti di partai politik bukanlah tanpa tantangan, didalamnya perempuan harus melawan sistem patriarki dan dominasi politik laki-laki yang bekerja secara sempurna. Namun hingga saat ini, terjunnya perempuan dalam sistem arena politik formal belum menjamin mulusnya agenda perjuangan politik perempuan. Tak sedikit perempuan yang berpolitik terbawa arus kerasnya kontestasi politik dan terbentur pada pusaran kepentingan yang tak berpihak kepada perempuan lalu menyeret mereka pada tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lain.

Semenjak terlepas dari belenggu otoriterisme orde baru, angin segar demokrasi lahir dalam kancah perpolitikan tanah air. Masyarakat bergairah kembali untuk *melek* politik, 48 (empat puluh delapan) partai politik berkontestasi dalam pemilu 1999. Panggung demokrasi digelar dan semua orang berhak untuk menentukan suara maupun berkontestasi memperebutkan suara. Tak terkecuali perempuan. Jika pada masa Orde Baru perempuan lebih banyak sebagai diam, maka pascareformasi, perempuan dapat memperoleh ruang untuk terjun menyerukan suaranya dalam arena politik formal. Gaung pemilu 1999 merupakan babak awal perempuan untuk terjun dalam politik formal lalu berkembang pada pemilu-pemilu selanjutnya. Pada pemilu tahun 2004, publik mulai ramai membicarakan diskursus perempuan dalam arena politik formal. Diskursus ini tentu tidak akan pernah lepas dari perbincangan kuota representasi 30% di parlemen. Diskursus ini

hampir selalu menghiasi tayangan layar kaca dan berita koran-koran. Representasi perempuan sebanyak 30 persen adalah upaya afirmatif bagi perempuan untuk terjun dalam politik. Ikhtiar ini merupakan upaya positif untuk mendorong perempuan memperjuangkan agenda politik perempuan di parlemen, meski hingga saat ini kuota tersebut belum juga terpenuhi.

Hasil pemilu pada tahun 2004 menunjukkan, dari kuota 30 persen yang menjadi acuan, hanya 11 persen perempuan yang akhirnya berhasil menduduki kursi parlemen. Sementara pada tahun 2009, terjadi kenaikan cukup signifikan dari pemilu sebelumnya yakni 18,2 persen perempuan yang duduk di parlemen. Sementara survei terbaru yang dirilis oleh Click Survei Indonesia (2013), yang melakukan penelitian terhadap 712 responden pemilih pemula (usia 17-21 tahun) di kawasan Daerah Perempuan Yogyakarta menunjukkan bahwa para pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak memilih pada pemilu 2014, sebanyak 85,9 persen mendukung calon perempuan untuk duduk di parlemen, sementara 84,2 persen menyatakan ketersediaan mereka untuk diwakili oleh kandidat perempuan di parlemen. Sebanyak 90,87 persen pemilih pemula tersebut melihat bahwa jenis kelamin bukanlah hal utama dalam melihat kandidat. Sikap idealisasi kandidat perempuan yang dipilih pemula adalah mereka yang berpengalaman dalam berpolitik.

Survei terakhir yang disebutkan di atas paling tidak memberikan gambaran positif masa depan politik formal perempuan di kalangan pemilih pemula, ditengah derasnya gempuran liberalisasi sistem politik di Indonesia. Perempuan memiliki kesempatan yang luas dan dipercaya untuk dipilih oleh para pemilih pemula, yang jumlahnya hampir mencapai 20-30 persen dari keseluruhan jumlah pemilih. Partisipasi perempuan dalam arena politik formal di parlemen, memiliki masa depan yang cukup baik, didasarkan dari peningkatan jumlah perempuan di parlemen pada tiga pemilu terakhir. Meskipun demikian, peningkatan jumlah perempuan di arena politik formal terutama di parlemen masih perlu dievaluasi. Karena banyak perempuan yang terjun di politik formal kurang memiliki agenda yang jelas untuk mengawal isu-isu yang sensitif dengan kebutuhan perempuan, disamping kapasitas yang masih belum terasah dengan baik, dibandingkan laki-laki yang sudah lama melenggang dalam kancah dunia politik. Kuota 30 persen perempuan di parlemen di kancah

politik nasional dan di beberapa tingkatan politik lokal tak serta merta menjamin bahwa perempuan-perempuan yang duduk di parlemen tersebut menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan. Jika pada masa orde baru, perempuan dibelenggu dalam ruang-ruang otoriterisme, maka pascareformasi, perempuan dihadang oleh penguatan politik identitas yang memunculkan formalisasi kebijakan yang mengatur tubuh perempuan.

Otonomi Daerah, Kesalehan Simbolik dan Politik Diskriminasi

Di arena politik nasional, perempuan dijegal dengan keluarnya produk perundangan yang dihasilkan oleh parlemen, seperti UU Pornografi. Sebuah hasil kompromistis, yang dianggap sebagai kemunduran bagi perjuangan kebijakan yang pro kepada perempuan. Di dalam tingkatan politik lokal pun, penguatan politik identitas ini juga tidak kalah pelik. Pasca digulirkannya UU 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, daerah diberikan sebuah keleluasaan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan secara lebih leluasa, sebagai konsekuensi dari proses demokratisasi pasca runtuhnya orde baru. Tetapi pemberian keleluasaan kewenangan terhadap pemerintah daerah dari pemerintah pusat justru memunculkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Komisi Nasional Perlindungan Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat terdapat 342 Peraturan Daerah atau perda yang diskriminatif terhadap perempuan pada tahun 2013. Kebijakan diskriminatif tersebut dikeluarkan berdasarkan kerangka moralitas dan agama. Angka ini meningkat dari tahun 2012 yakni sebanyak 282 perda diskriminatif dan sebanyak 207 perda diskriminatif pada tahun 2011. Munculnya kebijakan-kebijakan diskriminatif sebagai hasil dari pertarungan arena politik formal tidak lepas dari kuatnya perspektif pemikiran patriarkis dalam benak dan pikiran para pembuat kebijakan yang didominasi oleh laki-laki maupun perempuan yang tak memiliki perspektif yang mengakomodasi kebutuhan perempuan, sehingga pada akhirnya muncul berbagai kebijakan yang mengatur perempuan menjadi objek yang selayaknya didisiplinkan dan diatur perilaku, sikap dan tubuhnya.

Disamping perspektif yang didominasi oleh pola pikir patriarkis dalam isi kebijakan, secara sosiologis, fondasi masyarakat kita masih sangat lekat dalam religiositas simbolik. Kesalehan pribadi ditunjukkan

dalam bentuk ragawi, penggunaan simbol-simbol agama seperti pemakaian kerudung, jenggot panjang atau ritual-ritual yang seolah menampakan nilai-nilai religiusitas seseorang atau kelompok tertentu yang tampak sangat partikular dan parsial. Religiusitas simbolik menguatkan fragmentasi politik identitas pada kelompok-kelompok tertentu, dan terkadang berujung pada bentuk dominasi, intimidasi dan kekerasan pada kelompok yang tak sama, sebagai konsekuensi menakar kesalahan pribadi pada bentuk religiusitas simbolik. Ini tak lepas dari buah ekspresi identitas yang terkekang oleh keseragaman pada masa otoriterisme orde baru. Eskalasi penguatan kelompok identitas ini kemudian merambah pada bentuk kesalahan-kesalahan simbolik dan perempuan yang berada dalam piramida terbawah masyarakat patriarkis menjadi korbannya. Mereka didisiplinkan dan diatur dengan sedemikian rupa sehingga tak memiliki otonomi atas tubuh dalam penerapan kebijakan diskriminatif tersebut. Kebijakan tersebut merapal perempuan dalam bingkai kesucian dan penerimaan total atas kebijakan. Suara mereka tidak terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan politik formal.

Dalam arena politik formal maupun non formal, politik adalah seni untuk bernegosiasi dan memimpin. Seni berpolitik adalah netral gender, perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan seni berpolitik. Akan tetapi dalam masyarakat yang lekat dengan tradisi patriarkis, kepemimpinan selalu diidentikkan kepada laki-laki. Menurut Hibbah Rauf 'Izzat dalam *al-Mar'ah wa al-'A'mal as-Siyasi: Ru'Yah Islamiyah "Patriarkisme (hukum alabi) secara historis merupakan konsep Romawi, yang memberikan hak kepada kepala keluarga yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh anggota keluarga"* (Hasyim, 2001). Pemberian kekuasaan keluarga kepada laki-laki membuat laki-laki memiliki lebih banyak akses untuk mengontrol kekuasaan, mendapatkan sumber daya dan memiliki legitimasi untuk menjadi pemimpin. Sementara perempuan lebih banyak dianggap partisan dalam proses-proses tersebut, tak terkecuali dalam tradisi melakukan negosiasi dan memimpin dalam hal politik. Sehingga menjadi wajar jika kemudian perempuan menjadi lebih gagap dalam proses pembelajaran menjadi melakukan kepemimpinan dan bernegosiasi. Apalagi dalam ranah politik yang kental dengan arus liberalisasi politik, perempuan langsung berperan dalam keputusan-keputusan politik dalam eskalasi konflik kepentingan yang keras.

Sementara disisi lain akar kesejarahan peran perempuan di Indonesia dalam tradisi berpolitik timbul tenggelam berdasarkan rezim yang berkuasa.

Proses tradisi kepemimpinan perempuan tentu dapat kita tilik pada arena yang lebih mikro. Contoh sederhana, cobalah tengok bagaimana secara kultural perempuan memiliki banyak hambatan untuk menjadi pemimpin bagi lingkungan sekitar. Saat kita masih di sekolah dasar, setiap kali ada pemilihan ketua kelas, perempuan tak pernah menjadi prioritas untuk dipilih. Laki-lakilah yang pantas menjadi ketua kelas. Perempuan paling tinggi ditempatkan sebagai sekretaris ataupun bendahara. Sebuah posisi yang dianggap cocok karena perempuan dianggap lebih teliti. Atau pun, sempat terlontar dari kalangan laki-laki yang berpendidikan tinggi, seorang perempuan boleh menjadi apapun, dokter, pilot asalkan ia tetap mentaati kodratnya atau jika pun memiliki karier maka karier perempuan tersebut tidak boleh melebihi pasangannya (laki-laki). Bentuk-bentuk stereotip gender inilah yang begitu melekat pada diri perempuan, dan secara kultural menyebabkan banyak perempuan terhambat untuk memulai tradisi bernegosiasi dan memimpin dalam berpolitik. Hambatan itu disebabkan oleh faktor internal dari perempuan sendiri. Ia mengobjektifikasi hambatan kultural tersebut dan apatis karena menganggap ruang-ruang kepemimpinan dan berpolitik memang lekat pada laki-laki. Banyak perempuan yang kemudian ragu atas keputusan-keputusan diri yang seharusnya bisa ia buat secara otonom untuk memimpin dirinya sendiri. Pada tataran inilah perempuan menghadapi tantangan untuk membentuk model-model pembelajaran kepemimpinan politik.

Disamping hambatan kultural, faktor kesejarahan rezim yang berkuasa juga memengaruhi perjalanan perempuan untuk terjun ke dalam ranah politik, proses depolitisasi perempuan dari ranah-ranah pengorganisasian masyarakat dan kepemimpinan dalam politik terjadi pada saat fase masuk Orde Baru. Jika sebelumnya pada masa Orde Lama, perempuan banyak terlibat langsung dalam keputusan politik dan pengorganisasian masyarakat secara luas, seperti dalam organisasi Gerwani, maka setelah peristiwa 1965, perempuan mengalami domestifikasi oleh negara. Negara pada masa Orde Baru memunculkan tangan-tangan negara ke dalam ranah privat (keluarga). Orde Baru mengarusutamakan ideologi "ibuisme" yang berlaku dalam struktur keluarga dan memengaruhi gerak perempuan dalam konsep

berumahtangga hingga berorganisasi untuk mengasah kepemimpinan. Konstruksi keperempuanan pada masa Orde Baru di Indonesia, menempatkan negara pada posisi sentral dan berkepentingan besar melanggengkan manipulasi ideologi gender dengan memasukkan unsur perumahtangaan dan ibuisme (Suryakusuma, 2011). Proses ibuisme negara yang dilakukan pada masa orde baru tersebut mencerminkan bagaimana negara memosisikan dirinya sebagai keluarga dengan asas kekeluargaan. Masing-masing anggota yang ada dalam keluarga tersebut, diwajibkan untuk memberikan sumbangsuhnya kepada negara tanpa pamrih dan perempuanlah yang kemudian memberikan tenaga dan pengorbanan tanpa pamrih kepada negara. Tangan-tangan kekuasaan negara mencengkeram perempuan untuk kembali ke ranah domestik dan menjalankan serangkaian program penyeragaman pembangunan.

Foucault mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah nama yang diberikan pada suatu situasi strategi kompleks dalam suatu masyarakat, hubungan kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari hubungan-hubungan dalam proses ekonomi, penyebaran pengetahuan, hubungan seksual; kekuasaan adalah akibat langsung dari pemisahan, ketidaksamaan, dan ketidakseimbangan (diskriminasi); artinya kekuasaan merupakan situasi internal adanya perbedaan dan perbedaan ini berjalan di tempat kerja, keluarga, institusi, dalam berbagai pengelompokan (Haryatmoko, 2002). Ungkapan kekuasaan menurut Foucault tersebut berlaku dalam proses domestifikasi perempuan dan melumpuhkan tradisi kepemimpinan politik perempuan yang disebar dengan terminologi “bapak-ibuisme”, yakni bapak atau laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan sumber kekuasaan, sementara ibu sebagai perempuan merupakan mediator dari kekuasaan tersebut. Mediator disini merupakan simbol proses *priayisasi* yakni penggunaan nilai-nilai tradisional Jawa untuk kepentingan pembangunan dan modernitas yang dibalut dengan gaya militer.

Penyebaran ideologi ibuisme yang dilakukan oleh negara secara sistematis berhasil melumpuhkan kekuasaan otonom, solidaritas ideologi bahkan juga memperlebar jarak antar perempuan yang memiliki kelas dan status sosial yang berbeda. Dalam praktiknya, perempuan diwajibkan untuk mengikuti berbagai bentuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Semua perempuan di wilayah Indonesia wajib mengikuti PKK, penyeragaman ini berimbas pada tumpulnya

inisiatif-inisiatif perempuan pada ranah komunitasnya. Inisiatif yang muncul tak mendasarkan lagi pada perjuangan ideologis perempuan sebagai bagian yang setara untuk melakukan kepemimpinan dan tradisi bernegosiasi politik pada ranah komunitasnya. Sedangkan pada ranah keluarga posisi ideologi ibuisme yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga atau penguasa dan menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat, juga memberikan kerentanan kepada perempuan untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Politik Perempuan dalam Komunitas

Rifka Annisa, lembaga swadaya masyarakat dalam isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender selama kurang lebih 20 tahun melihat selalu ada hubungan erat antara bentuk-bentuk kebijakan negara dengan kerentanan perempuan untuk menjadi korban kekerasan dan ketidakberdayaannya secara politis sebagai perempuan. Ideologi ibuisme yang dibawa oleh negara Orde Baru selama 32 tahun, hingga saat ini memiliki pengaruh yang amat besar dalam banyak kasus kekerasan perempuan korban. Posisi kerentanan perempuan terlihat tatkala perempuan tetap menyimpan rapat berbagai bentuk kekerasan yang mereka alami karena ketidakberdayaan posisi dalam keluarga. Ideologi ibuisme menempatkan perempuan porsi yang tidak setara dalam berelasi dengan laki-laki. Mereka dibuat untuk merasa bergantung untuk meletakkan otonomi dirinya sebagai perempuan dan khawatir jika tidak mampu mendefinisikan diri mereka sebagai seorang perempuan, karena tidak adanya laki-laki yang menjadi suami mereka. Karena dalam konteks ibuisme negara, perempuan diposisikan sebagai pendamping tanpa pamrih kepada suami dan keluarga. Dampaknya perempuan akhirnya bergantung pada orang lain untuk menemukan keotentikan dirinya.

Disisi lain, Rifka Annisa juga melihat banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan, akibat ketidakberdayaan mereka secara ekonomi karena kuatnya otoritas laki-laki dalam keluarga untuk bisa mengakses sumber daya ekonomi dibandingkan perempuan. Maka tak heran, banyak perempuan yang datang ke Rifka Annisa merasa sangat sulit untuk lepas dari belenggu kekerasan karena mereka sadar betul, mereka tak memiliki akses ekonomi untuk menghidupi dirinya

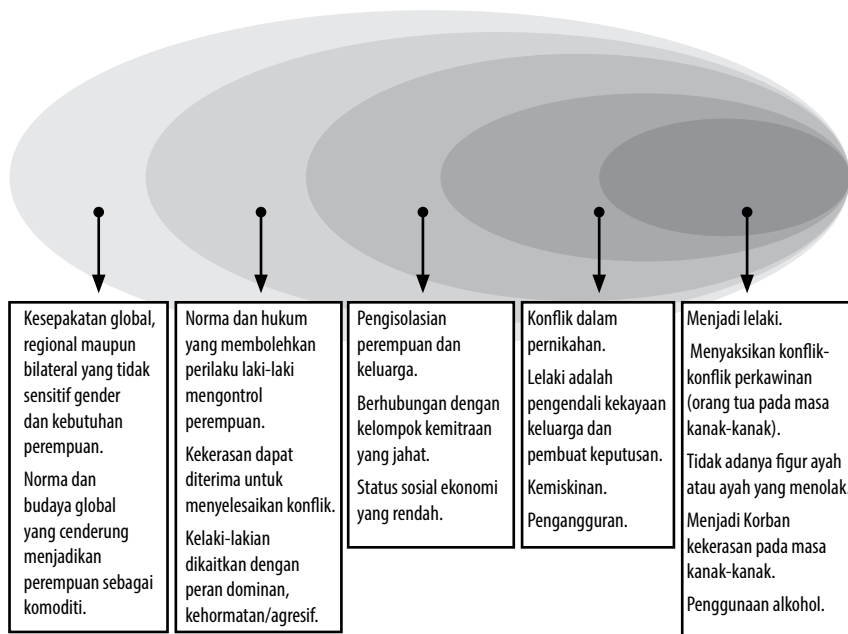
atau anak-anaknya kelak jika berpisah dari pasangannya. Hampir 90 persen perempuan yang mengalami kekerasan dan melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Rifka Annisa memutuskan untuk tetap berada dalam lingkaran kekerasan karena ketidakberdayaannya, baik secara ekonomi, sosial dan psikis. Mereka memiliki kelemahan untuk mendefinisikan diri dan menempatkan posisinya secara apik dan negoisiatif terhadap pasangan maupun dalam relasi dalam masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan politik. Dan ketidakberdayaan tersebut memang dikondisikan sedemikian rupa sehingga perempuan tidak memiliki kesadaran untuk menentukan arah keberdayaannya.

Selama hampir 32 tahun berada dalam ranah cengkeraman otoriterisme, perempuan praktis mengalami kekerasan, hambatan kultural dan struktural dalam proses pembelajaran kepemimpinan berpolitik. Sehingga perlu disadari betul, menerapkan proses pembelajaran perempuan untuk berkontestasi secara politis, baik dalam lembaga politik formal (parlemen, parpol) maupun diluar jalur politik formal membutuhkan energi yang besar. Pasca tahun 1998, bergulirnya reformasi, perempuan sebenarnya memiliki momentum untuk mulai kembali mendefinisikan dirinya tanpa belenggu ideologi ibuisme yang dilakukan oleh Orde Baru. Sayangnya, 32 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mengembalikan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses kontestasi secara sosial dan politis. Meski modernisasi merambah, namun pola pikir perempuan sebagai warga kelas dua dalam berbagai ranah masih sering kita temui.

Lalu bagaimana mendorong perempuan untuk memiliki inisiatif kepemimpinan dan berkontribusi bagi perubahan dirinya sendiri dan masyarakat terutama di luar partai politik di Indonesia? Menilik dari pengalaman Rifka Annisa yang bergerak dalam isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan, persoalan perempuan tidak pernah bisa dipisahkan dari struktur sosial yang lebih besar. Berdasarkan kerangka *ecological framework* (Heise, 1999), persoalan-persoalan perempuan termasuk di dalamnya persoalan kekerasan harus diselesaikan dengan menjalin jejaring intervensi yang berkesinambungan, termasuk didalamnya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di komunitasnya sebagai bagian dari realitas pembelajaran politik perempuan di luar politik formal.

Gambar 1.1

Kerangka Teori Ecological Framework (Heise.L, 1998).



Berangkat dari kerja di atas, sejak tahun 1993 Rifka Annisa, sebagai pusat krisis perempuan, awalnya memulai kerjanya dengan menggunakan basis pendampingan korban kekerasan. Pendampingan ini merupakan respons darurat terhadap banyak kasus kekerasan yang menimpa perempuan. Proses pendampingan menggunakan pendekatan psikologis dan hukum. Dalam perjalanannya, proses pendampingan kerap kali terhambat pada level komunitas. Banyak kasus kekerasan yang jalan di tempat akibat resistennya beberapa kelompok jika Rifka Annisa mengangkat kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik. Pembelajaran yang kemudian didapat, sangat naïf kiranya menyelesaikan kasus-kasus kekerasan tanpa melibatkan komunitas. Pada tahap inilah, disadari bahwa komunitas memiliki potensi besar untuk melakukan perubahan dan menjadi tempat bagi perempuan untuk menyuarkan suara dan kebutuhannya. Maka pada tahun 2003 Rifka Annisa memulai rencana awal untuk membuat sebuah pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini berbasis kesadaran untuk bergerak secara sukarela menangani masalah-masalah kekerasan disekitar dan

penguatan jaringan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Pendampingan di level komunitas awalnya diharapkan bisa menjadi pintu penanganan bagi perempuan korban dan persoalan-persoalan masyarakat berdasarkan inisiatif komunitas. Pendampingan komunitas yang dilakukan oleh Rifka Annisa menggunakan konsep *Community Based Crisis Center* (CBCC). CBCC menggunakan prinsip pendampingan komunitas berdasarkan kesadaran komunitas untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di komunitas pendampingan. Dorongan untuk menciptakan CBCC di berbagai komunitas semakin menguat ketika Rifka Annisa pada tahun 2005 mengubah basis kerjanya, dari pendampingan perempuan korban kekerasan melalui konseling menjadi pengorganisasian masyarakat dan advokasi.

Beberapa kelompok jaringan berbasis komunitas awalnya disambut positif oleh berbagai pihak. Komunitas atau masyarakat diberikan pendampingan awal untuk mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan sekitar dan melakukan penanganan awal jika terjadi kekerasan maupun penanganan konflik di masyarakat. Pada proses ini Rifka Annisa memberikan dasar pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, prinsip konseling awal, penanganan awal kepada perempuan korban dan memberikan upaya preventif untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan konflik di lingkungan komunitas. Salah satu dampingan komunitas Rifka Annisa adalah komunitas Cokrodiningratan yang berada dalam wilayah Kodya Yogyakarta. Kelurahan Cokrodiningratan merupakan daerah pinggiran di Kota Yogyakarta. Selain itu Rifka Annisa juga melakukan pendampingan di tujuh komunitas di Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul

Pada awalnya konsep CBCC disambut positif, namun dalam perjalanannya, konsep ini banyak menemukan kesulitan. Konsep CBCC dengan melakukan pendampingan komunitas ternyata membutuhkan energi yang cukup besar, selain bahwa tidak mungkin komunitas terus menerus didampingi tanpa memunculkan kemandirian. Dalam proses pendampingan komunitas, Rifka Annisa juga melihat potensi yang besar pada perempuan-perempuan yang ada di komunitas tersebut. Kerap kali beberapa perempuan memiliki inisiatif langsung untuk melakukan kerja-kerja pendampingan maupun kegiatan sosial yang ada di wilayah komunitasnya. Mereka vokal menyuarakan suaranya dan mulai bergerak. Awalnya, tentu mereka kerap kali masih malu-

malu untuk memunculkan inisiatif, hal inilah yang paling sering tergambar pada dinamika komunitas. Dari hal inilah, mulai disadari bahwa proses pendampingan komunitas haruslah memunculkan kesempatan dan dorongan kepada perempuan di setiap komunitas untuk menjadi “pemimpin” di komunitasnya. Para perempuan inilah yang harus bergerak untuk bersama-sama perempuan lain melakukan perubahan terhadap komunitasnya.

Di lapangan, potensi-potensi yang ada dalam tubuh perempuan di komunitas tidaklah main-main. Mereka memiliki kepedulian yang luar biasa untuk menggerakkan komunitasnya. Seperti salah satu pemimpin perempuan di Cokrodiningratan, bernama Titik. Ia telah mengupayakan banyak cara untuk menghentikan kasus kekerasan terhadap anak di daerahnya. Awalnya ia acapkali frustrasi dengan kejadian kekerasan yang berulang. Saat ia berkenalan dengan Rifka Annisa, ia terdorong untuk melakukan perubahan dengan menginisiasi kelompok yang berisi anak-anak. Didalam kelompok-kelompok tersebut, anak-anak kemudian memiliki saluran untuk mengekspresikan diri dengan bermain musik. Sehingga anak-anak, tidak terjun ke jalan dan rentan mengalami kekerasan. Pengalaman lain di Kedungpring Bantul, para perempuan ini mengisiasi dirinya dengan membentuk kelompok arisan untuk membentuk keberdayaan ekonomi sekaligus membentuk persaudaraan dan kepedulian jika ada persoalan kekerasan yang dialami perempuan dan anak yang ada di komunitasnya.

Penutup

Apa yang bisa ditarik dari proses munculnya perempuan pemimpin di komunitas adalah sejatinya perempuan memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan dengan menggunakan seni memimpin yang berbeda dengan pendekatan dalam politik formal. Perempuan di komunitas memiliki pendekatan politik yang feminin, menyentuh pada persoalan-persoalan mendasar yang ada disekitarnya. Kepekaan ini didasarkan nalurinya untuk merawat. Kita tentu bisa membayangkan bahwa jika pendampingan komunitas berbasis pada perempuan ini dilakukan di setiap tempat, maka banyak sekali persoalan-persoalan di komunitas bisa diselesaikan. Selain itu, memunculkan pemimpin-pemimpin perempuan sebetulnya tidaklah sulit, jika kita sadar, banyak sekali perempuan di komunitas-komunitas yang memiliki “inisiatif

politik”, hanya saja membutuhkan dorongan untuk bergerak.

Satu hal yang bisa dipelajari dari proses pemimpin perempuan di komunitasnya adalah mereka menggunakan cara-cara strategis dan negoisiatif dalam proses-proses memengaruhi kebijakan pada level komunitas. Dalam acara-acara komunitas mereka kerap menyuarakan kepentingan diri dan kaum perempuan di komunitasnya untuk didengar oleh pemangku kepentingan di level komunitas. Inilah sebagian kecil dari realitas politik perempuan di luar hiruk-pikuk tahun politik. Tentu sudah saatnya melihat politik secara lebih luas. Perempuan-perempuan pemimpin di komunitas kerap kali tak terlihat dalam proses-proses politik formal, tetapi merekalah yang menjadi ujung tombak perubahan dalam masyarakat. Seni berpolitik mereka jelas, memiliki visi untuk memimpin perubahan dari level yang paling dekat dengan diri mereka, keluarganya, komunitasnya. Dan dari hal inilah, perempuan bisa memulai ruang untuk berpolitik dalam proses, bukan hanya instan dan menghamba jabatan.

Referensi

- Haryatmoko. 2002. “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan” dalam Majalah *BASIS*, Jakarta.
- Hasyim & Kurniawan A. 2007. *Menjadi Laki-Laki*. Yogyakarta: Rifka Annisa WCC.
- Heise, L. 1998. “Violence against women: An integrated, ecological framework” dalam *Violence Against Women* 4 (3).
- Suryakusuma, Julia. 2012. *Ibuisme Negara*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Survei Pemilih Pemula*. Click Survei Indonesia. Yogyakarta.